

PERAN PRANCIS DALAM PROSES PERDAMAIAN DI MALI TH 2020

Rudi Haryono Prihartono¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Africa and the conflict seemed to have become a partner can not be separated from one another, it is no exaggeration when look reality in the continent these days. Various conflicts that occur both internally and between countries become constellation can not be separated from politics this region. So it is not surprising that these conditions provoke the presence of foreigners who come to promote peace. As is the case with what is experienced by Mali, where the internal conflict that ensues brings France to become involved in the conflict. French involvement in the conflicts in Mali becomes an interesting phenomenon to be analyzed. Which in this study will attempt to analyze the factors behind France 's involvement in the conflict in Mali. In analyzing the issues raised in this paper researchers used a realistic approach with a few concepts to assist researchers in understanding the phenomena that take place between them the concept of national interest, the concept of intervention, foreign policy, regional security as well as tools of analysis using a two -level game theory. In writing this using a type of qualitative research where data are available to support the analysis of secondary data derived from litelatur form or document. The results of this study found that there are two factors that drive the measures taken by the French government decided to get involved in the intervention in Mali. The driving factors associated with the encouragement that comes from domestic or domestic and encouragement of foreign or international. The driving factor in the domestic level including the implementation of a leadership assertion newly elected President Macron, France and the demands of society which needs a lot of uranium owned by Mali. While external factors that drive the French decided to intervene in Mali is to stem China being oriented to Africa, demand from the government of Mali and affirming the French influence in North Africa.

Keywords: French intervention, Mali conflict, National interest, Foreign policy

ABSTRAK

Afrika dan konflik seakan telah menjadi sebuah pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidaklah berlebihan saat melihat realitas yang ada di benua tersebut akhir-akhir ini. Berbagai konflik baik yang terjadi secara internal maupun antar negara menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perpolitikan dikawasan ini. Maka tidak mengherankan apabila kondisi ini memancing kehadiran pihak asing yang datang untuk mengusung perdamaian. Seperti halnya dengan apa yang dialami oleh Mali, dimana konflik internal yang terjadi kemudian membawa Prancis untuk terlibat dalam konflik tersebut. Keterlibatan Prancis dalam konflik di Mali menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dianalisis. Dimana dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Prancis dalam konflik di Mali. Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan realis dengan beberapa konsep untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi diantaranya konsep kepentingan nasional, konsep intervensi, kebijakan luar negeri, keamanan kawasan serta sebagai tools of analysis menggunakan *two level game theory*. Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dimana data yang didapatkan untuk mendukung analisis berasal dari data sekunder yang berupa litelatur maupun dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prancis dalam memutuskan untuk terlibat dalam intervensi di Mali. Faktor pendorong tersebut terkait dengan dorongan yang berasal dari dalam negeri atau domestik dan dorongan dari luar negeri atau internasional. Faktor pendorong dalam tataran domestik tersebut diantaranya adalah implementasi dari penegasan kepemimpinan Presiden Hollande yang baru terpilih, tuntutan dari masyarakat Prancis dan kebutuhan Uranium yang banyak dimiliki oleh Mali. Sementara faktor eksternal yang mendorong Prancis memutuskan untuk melakukan intervensi di Mali adalah untuk membendung China yang mulai berorientasi ke Afrika, Permintaan dari pemerintah Mali dan Mengukuhkan pengaruh Prancis di Afrika Utara.

Kata Kunci: Intervensi Prancis, Konflik Mali, Kepentingan nasional, Kebijakan luar negeri

PENDAHULUAN

Afrika, sebuah benua yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah baik secara hayati maupun non-hayati. Tidak dapat dipungkiri bahwa Afrika menjadi salah satu tempat

dimana peradaban manusia berkembang tepatnya di tepi sungai nil Mesir. Afrika seperti benua lain di luar Eropa pernah mengalami kolonialisme, bahkan benua ini dianggap sebagai benua yang memiliki sejarah paling buruk terkait dengan kolonialisme Eropa. Dimana pada masa ini eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia (perbudakan) dilakukan secara besar-besaran. Eksploitasi sumber daya manusia yang terkait dengan perbudakan dapat dilihat dari diaspora orang-orang kulit hitam yang berada diberbagai belahan dunia sebagai akibat dari perpindahan orang-orang Afrika yang dikirim ke berbagai wilayah untuk dijadikan budak. Selain itu kekayaan sumber daya alam yang melimpah di benua Afrika tersebut tidak juga dapat membawa mereka pada kesejahteraan. Dimana hampir sebagian besar negara di Afrika masuk dalam kategori negara miskin (*Less Development Country/ LDC*).

Kemiskinan yang melanda negara-negara di Afrika tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik yang terjadi di negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi baik bersifat antar negara (*interstates war*) maupun yang bersifat perang saudara (*intrastate war*). Seiring dengan arus globalisasi konflik yang berlangsung membuat perubahan konflik di Afrika kearah perang saudara yang intens. Rwanda dan Somalia menjadi salah satu representasi negara yang hancur akibat perang saudara yang terkait dengan faktor etnisitas dan politis di Afrika. Konflik internal tersebut tidak dapat dilepaskan dari heterogenitas yang dimiliki oleh Afrika yang meskipun sesame kulit hitam namun terbagi kedalam ribuan suku. Dimana identitas kesukuan diantara mereka masih sangat kental, hal ini menjadi sangat rentan terlebih bila permasalahan dikaitkan dengan kondisi mayoritas dan minoritas dalam sebuah negara. Oleh karena itu negara-negara di Afrika lebih sibuk untuk mengurus permasalahan konflik dibandingkan dengan mengurus pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan semakin merajalela di Afrika, bahkan beberapa negara tergolong dalam kategori negara gagal (*failed states*)

Kondisi ini yang sejak lama menjadi perhatian dunia bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan untuk memperhatikan akar penyebab yang mendasari konflik di negara-negara Afrika. Dalam studi yang lebih mendalam menemukan bahwa ada masalah lebih besar pada kemiskinan, kekurangan pangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, peminggiran dan pengabaian, khususnya kekerasan seksual bisa menjadi perangkat ampuh untuk mencegah konflik di negara-negara Afrika. PBB akan terus mendukung semua upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di kawasan Afrika. Ketegangan memuncak saat orang merasa tersingkir, terpinggirkan dan ditolak peran serta mereka dalam kehidupan politik dan sosial di negaranya. Kerusakan terjadi manakala orang menjadi miskin, menganggur dan tidak mempunyai harapan. Upaya menengahi sebaiknya bukan hanya berupa persetujuan di antara elit politik yang berjanji akan menyelesaikan masalah politik melainkan juga mengajak peran-serta semua pemangku kepentingan(Mardiani, 2023).

Sejak lama masyarakat internasional dan PBB melakukan berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Afrika, namun hal tersebut banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut terkait dengan kompleksitas konflik yang terjadi serta kurangnya dukungan politis dalam pelaksanaan upaya perdamaian tersebut. Kondisi ini pula terkait dengan kurang tepatnya penanganan yang dilakukan oleh pihak eksternal (negara dan pihak diluar Afrika) dalam menanganai konflik yang bukan menciptakan perdamaian namun malah semakin memperkeruh konflik yang terjadi. Hal ini yang kemudian membuat wacana untuk menyerahkan permasalahan konflik di Afrika kepada negara-negara Afrika itu sendiri. Namun hal ini pun tidak membuat kondisi di Afrika semakin membaik, dimana di negara-negara lain muncul berbagai permasalahan serta pergolakan internal yang mengarah kepada konflik internal berlarut-larut seperti yang terjadi di Libya. Selain itu saat ini Mali menjadi

sorotan terkait dengan konflik bersenjata antara negara tersebut dengan kelompok pemberontak dikawasan utara negaranya.

Pemberontakan di Mali dilakukan oleh kelompok militan Islam yang kemudian dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda. Pemberontak menuntut kemerdekaan untuk mendirikan sebuah negara islam di utara negara tersebut. Tuntutan yang sangat sulit untuk dikabulkan oleh pemerintah Mali, yang kemudian direspon dengan gerakan mengangkat senjata untuk melawan pemerintah Mali dengan mengobarkan jihad. Kelompok pemberontak yang menamakan dirinya *Mouvement pour la Liberation de l'Azawad (MNLA)* yang kemudian melakukan serangkaian serangan untuk mencapai tuntutannya. Pemberontakan ini diperburuk dengan kesepakatan antara kelompok Tuareg yang sekuler dan pemberontak Islam terjadi beberapa pekan setelah diskusi panjang antara dua kelompok yang sejak lama berbeda pandangan, tujuan dan ideologi itu. Kesepakatan ini juga menjadi titik balik bagi Mali Utara yang terlepas dari kontrol pemerintah pusat sejak kudeta Maret tahun 2012(BBC News Indonesia, 2012). Namun pemerintah Mali tidak tinggal diam dan melakukan berbagai upaya untuk memberantas pemberontak dan mengembalikan kekuasaan di wilayah utara.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Mali untuk menghancurkan pemberontakan tersebut, namun tidak berhasil dan menjadikan konflik tersebut menjadi semakin berlarut-larut. Melihat konflik tersebut Prancis, sebagai negara yang pernah menjajah Mali kemudian mengirimkan pasukannya untuk membantu pemerintah Mali memerangi kelompok pemberontak tersebut. Prancis melancarkan perang di Mali pada 11 Januari 2013 dengan dalih melawan oposisi. Hal ini tentu saja mendapatkan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun, Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, mengatakan intervensi militer ke Mali dilakukan karena Prancis yakin bahwa keberadaan negara sedang dipertaruhkan. Pemerintah Prancis melihat kondisi tentara Mali dalam keadaan berantakan dan membiarkan banyak kota jatuh menyusul pertempuran sengit sejak para pemberontak melakukan perlawanan hampir setahun lalu di negara yang terletak di sebelah utara benua Afrika ini.

Konflik yang terjadi dalam sebuah negara sekalipun sudah seharusnya menjadi perhatian dari negara-negara lain. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya efek spill over konflik ke negara-negara yang berada didekatnya. Apabila hal ini terjadi maka eskalasi dari konflik akan semakin membesar dan meluas yang bila terjadi akan sangat sulit untuk ditangani dan akan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun korban jiwa yang sangat besar. Kondisi seperti ini senantiasa mendominasi karakteristik konflik yang terjadi di negara-negara berkembang paska berakhirnya perang dingin. Konflik yang terkait dengan permasalahan yang berbau etnisitas, agama dan politik (pemisahan diri) menjadi tema besar dari berbagai konflik internal. Kondisi ini yang senantiasa mendorong berbagai upaya internasional dalam meredakan berbagai konflik yang didasarkan kepada mandat dan justifikasi dari PBB sebagai representasi dari masyarakat Internasional.

Permasalahan intervensi sebuah negara atau PBB sekalipun masih sering menuai kontroversi terkait dengan justifikasi, keterlibatan negara serta hasil dari intervensi tersebut. Kegagalan dan menghentikan konflik masih menjadi cerita yang senantiasa tercipta sebagai hasil dari intervensi tersebut. Meskipun intervensi tersebut senantiasa mengatasnamakan kemanusiaan namun tidak jarang beberapa intervensi dilakukan atas dasar kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh sebuah negara atau kelompok negara. Intervensi atas dasar kepentingan dari satu negara terhadap negara lain dapat terlihat dari beberapa kasus yang diantaranya intervensi AS di Irak dan intervensi NATO di Libya. Dimana dalam dua kasus tersebut kepentingan politik yang diusung mengensampingkan justifikasi kemanusiaan yang idealnya menjadi dasar intervensi tersebut dilakukan. Hal yang sama pun terjadi dengan

intervensi yang dilakukan oleh Prancis di Mali, dimana Prancis mengirimkan tentaranya untuk membantu pemerintah Mali dalam memerangi pemberontak.

Dalam melihat permasalahan intervensi yang dilakukan oleh Prancis di Mali tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Prancis melakukan intervensi ke negara tersebut. Intervensi yang dilakukan sejak tahun 2012 tersebut akan menjadi fokus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Dimana analisis akan dilakukan kepada kepentingan yang diusung oleh Prancis sebagai faktor pendorong kebijakan intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk membantu pemerintah Mali dalam memerangi kelompok pemberontak tersebut.

Pengiriman tentara Prancis ke Mali ini mengingatkan akan intervensi yang dilakukan NATO di Libya dibawah pimpinan Prancis. Meskipun telah melakukan pergantian kepemimpinan dari Sarkozy ke Francois Hollande, Prancis tetap menaruh perhatian yang besar ke negara-negara bekas jajahannya di Afrika yang tengah mengalami permasalahan internal khususnya terkait konflik bersenjata. Setelah sekian lama Prancis mengabaikan keadaan dari negara-negara yang dulu pernah menjadi wilayah jajahannya Prancis saat ini mulai kembali memperlihatkan eksistensinya kembali di Afrika. Sebuah negara tidak akan mungkin mengirimkan angkatan perangnya untuk membantu negara lain tanpa ada maksud atau kepentingan yang menyertainya. Terlebih pro dan kontra masih terjadi diantara negara-negara di dunia atas keterlibatan Prancis di Mali, namun Prancis tetap tidak bergeming dan melanjutkan operasi untuk membantu pemerintah Mali menghancurkan pemberontak/ oposisi di Mali Utara. Analisis mengenai keterlibatan Prancis untuk membantu pemerintah Mali dapat menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk diangkat.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik ini menggunakan pendekatan realis sebagai landasan utama untuk menganalisis perilaku Prancis dalam intervensi Mali. Pendekatan realis memandang negara sebagai aktor utama dalam politik internasional yang bertindak rasional dalam mengejar kepentingan nasional melalui kekuasaan (*power*)(Morgenthau, 1948). Dalam pandangan ini, segala kebijakan negara didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dan manfaatnya bagi kepentingan nasional, dengan empat asumsi dasar: negara sebagai aktor tunggal, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, negara sebagai aktor rasional, dan keamanan nasional sebagai isu utama.

Konsep kebijakan luar negeri dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional melalui interaksi dengan aktor internasional lainnya. Kebijakan ini melibatkan pertimbangan domestik dan internasional, dimana perumusan kebijakan merupakan proses memilih alternatif terbaik di tengah ketidakpastian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan meliputi tekanan eksternal, kebiasaan lama, sifat pribadi pemimpin, pengaruh kelompok luar, dan pengalaman masa lalu, serta dilandasi nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Kepentingan nasional menjadi dasar fundamental yang mengarahkan perumusan kebijakan luar negeri, terdiri dari kepentingan vital (*core interests*) dan kepentingan sekunder (*secondary interests*). Nuechterlin mengklasifikasikan kepentingan nasional ke dalam empat jenis: pertahanan, ekonomi, tata internasional, dan ideologi. Dalam perspektif realis, kepentingan nasional merupakan upaya mengejar kekuasaan untuk mengembangkan kontrol terhadap negara lain melalui pemaksaan atau kerjasama.

Analisis menggunakan *Two Level Game Theory* yang mengasumsikan keputusan negara dipengaruhi faktor domestik dan internasional secara bersamaan(Putnam, 1988). Level

domestik melibatkan upaya mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kelompok kepentingan, sementara level internasional berkaitan dengan posisi tawar dan pencapaian kesepakatan dengan aktor internasional. Keterkaitan dinamika politik domestik dan internasional menciptakan kompleksitas dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dimana pemimpin harus membangun koalisi domestik untuk legitimasi sekaligus merespons kondisi lingkungan internasional yang mencakup konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Prancis dalam konflik Mali. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan membuat gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki, tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji konsep-konsep dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, laporan, surat kabar, majalah, dan sumber internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan induktif melalui tiga tahapan: reduksi data untuk merangkum dan memfokuskan hal-hal penting; display data dengan membuat matriks, grafik, dan charts untuk melihat gambaran keseluruhan; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan kausalitas dari data yang diperoleh.

Pengujian keabsahan data dilakukan berdasarkan empat kriteria: derajat kepercayaan (*credibility*) untuk memastikan tingkat kepercayaan temuan; keteralihan (*transferability*) untuk menilai kemungkinan penerapan hasil pada konteks lain; ketergantungan (*dependability*) sebagai substitusi reliabilitas dalam penelitian kualitatif; dan kepastian (*confirmability*) yang menekankan pada data daripada peneliti. Validasi data diperkuat melalui diskusi dengan teman sejawat dan penggunaan bahan referensi berupa literatur, dokumen autentik, dan sumber pendukung lainnya untuk memperkecil kemungkinan kekeliruan dalam analisis.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Prancis

Prancis terletak di Eropa Barat dengan luas wilayah ± 551.500 km², berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Spanyol, dan Andorra, serta memiliki garis pantai di Laut Mediterania, Samudra Atlantik, dan Selat Inggris. Secara historis, Prancis merupakan kekuatan besar di Eropa sejak abad pertengahan, berperan penting dalam berbagai perang besar seperti Perang Seratus Tahun, Revolusi Prancis, hingga Perang Dunia I dan II. Setelah kekalahan Jerman pada PD II, Prancis menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Prancis menganut sistem republik semi-presidensial dengan pembagian kekuasaan eksekutif antara Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memegang

kendali kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan Perdana Menteri fokus pada urusan domestik.

Prancis mengedepankan multilateralisme, memperkuat perannya di Uni Eropa, NATO, dan organisasi internasional lainnya. Negara ini mempertahankan hubungan erat dengan bekas koloni di Afrika, termasuk Mali, melalui kerja sama ekonomi, budaya, dan pertahanan. Prancis memiliki perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa, dengan sektor andalan industri, teknologi, pariwisata, dan energi. Kepentingan ekonomi di luar negeri, termasuk akses terhadap sumber daya alam, menjadi bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Militer Prancis termasuk terkuat di Eropa, dilengkapi teknologi modern dan memiliki kemampuan proyeksi kekuatan global. Angkatan bersenjata terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, serta pasukan nuklir strategis.

Gambaran Umum Mali

Mali adalah negara di Afrika Barat dengan luas wilayah $\pm 1.240.000 \text{ km}^2$, berbatasan dengan Aljazair, Niger, Burkina Faso, Pantai Gading, Guinea, Senegal, dan Mauritania. Wilayahnya didominasi gurun di utara dan sabana di selatan. Secara historis, Mali merupakan bagian dari kerajaan besar seperti Kerajaan Mali dan Kerajaan Songhai, yang kaya akan perdagangan emas dan garam. Mali merdeka dari Prancis pada 22 September 1960. Mali menganut sistem republik dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hubungan luar negerinya banyak terjalin dengan negara-negara Afrika Barat, Uni Afrika, serta negara bekas penjajah seperti Prancis. Perekonomian Mali bergantung pada pertanian, peternakan, dan pertambangan. Emas, kapas, dan uranium merupakan komoditas ekspor utama. Ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sangat tinggi akibat lemahnya infrastruktur dan seringnya konflik. Penduduk Mali berjumlah sekitar 20 juta jiwa, terdiri dari berbagai etnis seperti Bambara, Tuareg, dan Fulani. Perbedaan etnis dan agama sering menjadi sumber ketegangan politik.

Gambaran Umum Konflik di Mali

Konflik Mali berakar dari ketidakpuasan etnis Tuareg di wilayah utara, yang merasa terpinggirkan secara politik dan ekonomi. Pada 2012, gerakan separatis Tuareg (MNLA) memproklamasikan kemerdekaan Azawad. Namun, wilayah itu segera dikuasai kelompok militan Islam seperti Ansar Dine, AQIM, dan MUJAO yang menerapkan hukum syariah ketat (Chauzal & van Damme, 2015). Pemerintah Mali yang lemah tidak mampu mengendalikan situasi. Kudeta militer pada 2012 semakin memperburuk keadaan. Kelompok militan terus melancarkan serangan, bahkan mengancam ibu kota Bamako. Hal ini mendorong pemerintah Mali meminta bantuan internasional, termasuk kepada Prancis. Negara Prancis melancarkan Operasi Serval pada Januari 2013 untuk menghentikan laju kelompok militan. Operasi ini berhasil merebut kembali kota-kota utama di utara Mali, namun perlawanan sporadis terus berlanjut (Fakhrudin, 2018). Pada 2014, operasi ini diganti menjadi Operasi Barkhane, berfokus pada kontra-terorisme di seluruh wilayah Sahel. Meski operasi militer terus dilakukan, serangan kelompok militan tetap meningkat, menimbulkan korban sipil dan militer. Kondisi ini memunculkan perdebatan di Prancis dan Mali terkait efektivitas intervensi tersebut.

Analisis menggunakan Two Level Game Theory untuk menjelaskan bagaimana keputusan intervensi Prancis dipengaruhi oleh tekanan domestik (level internal) dan tekanan internasional (level eksternal).

- Level Internal mencakup faktor politik domestik, opini publik, dan kepentingan ekonomi.
- Level Eksternal mencakup hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan ancaman terhadap kepentingan strategis di luar negeri.

Berdasarkan kerangka *Two Level Game Theory*, faktor domestik menjadi salah satu penentu utama dalam kebijakan intervensi Prancis di Mali. Faktor ini mencakup kepentingan politik, tekanan masyarakat, dan kebutuhan ekonomi dalam negeri yang mendorong pemerintah mengambil langkah militer.

1. Penegasan Kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron

Setelah terpilih sebagai Presiden Prancis, Emmanuel Macron perlu membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa, tidak hanya di kancah domestik tetapi juga internasional. Intervensi di Mali menjadi ajang untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam isu keamanan global, khususnya di wilayah bekas koloni Prancis. Konteks politik dalam negeri menuntut Macron untuk mempertahankan reputasi Prancis sebagai kekuatan militer di Afrika dan mitra utama dalam menjaga stabilitas kawasan Sahel. Keterlibatan ini juga memberi Macron panggung diplomasi untuk mengonsolidasikan posisinya di Eropa, memperkuat pengaruh Prancis dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Selain itu, intervensi militer dianggap dapat memperkuat dukungan politik dalam negeri dengan menampilkan pemerintah sebagai pihak yang proaktif dalam memerangi terorisme internasional, yang juga dipandang relevan bagi keamanan nasional Prancis.

2. Tuntutan Masyarakat Prancis untuk Berperan dalam Penyelesaian Konflik Mali

Opini publik Prancis, yang terpengaruh oleh media dan wacana politik, memandang bahwa stabilitas Mali berhubungan langsung dengan keamanan Prancis. Wilayah Sahel menjadi sumber potensi ancaman, termasuk jaringan teroris yang bisa menysasar kepentingan Prancis di dalam maupun luar negeri. Ada persepsi bahwa membiarkan Mali jatuh ke tangan kelompok ekstremis akan memperburuk migrasi ilegal, perdagangan narkoba, dan arus pengungsi ke Eropa. Masyarakat juga menganggap Prancis memiliki tanggung jawab moral dan historis terhadap Mali sebagai bekas jajahan. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan veteran militer turut mendorong pemerintah mempertahankan kehadiran militer di Mali. Sentimen ini diperkuat oleh pernyataan para pemimpin politik yang mengaitkan intervensi dengan upaya melindungi warga sipil dari kekejaman kelompok ekstremis.

3. Kebutuhan Eksplorasi Minyak dan Uranium di Mali

Dari sudut pandang ekonomi, Mali memiliki sumber daya alam yang strategis bagi kepentingan Prancis, terutama uranium yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Prancis (Sianipar, 2019). Meskipun sebagian besar pasokan uranium berasal dari Niger, cadangan di Mali dipandang sebagai sumber alternatif dan penyangga ketahanan energi jangka panjang. Selain uranium, Mali memiliki potensi cadangan minyak dan gas yang menarik minat perusahaan-perusahaan energi Prancis. Stabilitas politik di Mali diperlukan untuk menjamin kelancaran investasi dan eksplorasi. Intervensi militer dilihat sebagai sarana untuk melindungi akses dan kepentingan bisnis tersebut. Dengan demikian, faktor domestik ini tidak hanya mencakup motivasi politik dan keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi yang erat kaitannya dengan kebijakan energi nasional Prancis.

Ketiga faktor domestik tersebut saling berhubungan dan memperkuat alasan pemerintah Prancis untuk melanjutkan intervensi militer di Mali pada 2020. Namun, faktor domestik saja tidak cukup menjelaskan keseluruhan keputusan. Faktor eksternal, yang mencakup dinamika geopolitik, permintaan resmi dari negara mitra, dan pertimbangan

pengaruh kekuatan global di Afrika, juga memainkan peran penting. Bagian berikutnya akan membahas secara rinci faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan ini.

Faktor eksternal atau internasional menjadi salah satu pendorong kuat kebijakan intervensi Prancis di Mali pada tahun 2020. Faktor ini berhubungan dengan dinamika hubungan internasional, kepentingan strategis global, dan interaksi Prancis dengan aktor-aktor lain di kancah internasional. Pertama, adanya kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin mengarah ke Afrika memunculkan kekhawatiran bagi Prancis. Selama dua dekade terakhir, Tiongkok memperluas pengaruhnya di Afrika melalui investasi besar-besaran, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama perdagangan (Oktariyansah, 2025). Wilayah Sahel, termasuk Mali, menjadi target penting bagi ekspansi ini. Bagi Prancis, yang memiliki hubungan historis dan kepentingan ekonomi di Afrika Barat, meningkatnya pengaruh Tiongkok dapat menggeser posisi strategisnya. Intervensi militer di Mali dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membendung pengaruh Tiongkok dan memastikan bahwa Prancis tetap menjadi aktor utama di kawasan tersebut. Dengan menjaga stabilitas Mali, Prancis tidak hanya melindungi kepentingan keamanan, tetapi juga mempertahankan akses ekonominya serta memelihara hubungan diplomatik yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Kedua, faktor eksternal yang mendorong keterlibatan Prancis adalah adanya dukungan dan legitimasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik di Mali telah mendapat perhatian serius dari komunitas internasional, terutama setelah kelompok-kelompok militan menguasai sebagian besar wilayah utara dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian regional. PBB melalui resolusinya memberikan mandat untuk mendukung operasi militer yang bertujuan memulihkan stabilitas dan mendorong proses perdamaian di Mali. Dukungan ini menjadi landasan legal dan moral bagi Prancis untuk mengerahkan pasukan dan sumber daya militernya. Dengan legitimasi internasional tersebut, Prancis dapat meredam kritik bahwa intervensinya semata-mata didorong oleh kepentingan nasional, karena secara resmi mereka juga menjalankan misi kemanusiaan dan stabilisasi.

Ketiga, permintaan langsung dari pemerintah Mali untuk mendapatkan bantuan militer menjadi faktor penting yang memperkuat keputusan intervensi (Fakhrudin, 2018). Pemerintah Mali, yang menghadapi ancaman eksistensial dari kelompok pemberontak bersenjata, menyadari keterbatasan kekuatannya dalam mengatasi krisis ini. Permintaan resmi tersebut tidak hanya memberikan dasar diplomatik yang kuat bagi Prancis, tetapi juga memperlihatkan adanya kemitraan yang saling menguntungkan. Bagi Prancis, membantu pemerintah Mali berarti memperkuat hubungan bilateral, mempertahankan pengaruh politik, serta menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah bekas jajahannya.

Keempat, intervensi di Mali juga berkaitan erat dengan upaya Prancis mengukuhkan pengaruhnya di Afrika Utara dan Afrika Barat (Sianipar, 2019). Secara historis, Prancis memiliki jaringan politik, ekonomi, dan militer di kawasan tersebut, yang terbentuk sejak era kolonial. Kehadiran militer di Mali memungkinkan Prancis menjaga keunggulan strategisnya, sekaligus mengirim pesan kepada negara-negara lain di kawasan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang dapat diandalkan dalam menghadapi ancaman keamanan. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, hal ini juga menjadi sarana bagi Prancis untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan global menengah yang mampu memproyeksikan kekuatan ke luar negeri.

Faktor eksternal ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi Prancis di Mali tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi geopolitik dan persaingan antarnegara besar. Keputusan tersebut berada pada persimpangan antara kepentingan nasional, tuntutan mitra internasional, dan dinamika persaingan global. Dengan mempertimbangkan tekanan domestik dan dorongan eksternal secara bersamaan, Prancis memposisikan dirinya sebagai aktor kunci dalam proses

perdamaian Mali, meskipun intervensi ini tetap menimbulkan perdebatan terkait efektivitas dan motivasi sebenarnya. Dalam perspektif *Two Level Game Theory*, faktor eksternal ini memberikan justifikasi tambahan yang memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat domestik, sekaligus memenuhi tuntutan dan ekspektasi di tingkat internasional.

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, terlihat bahwa intervensi Prancis di Mali pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kombinasi dorongan dari luar negeri dan kondisi di dalam negeri. Permintaan resmi dari pemerintah Mali, dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekhawatiran atas semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Afrika, serta kepentingan mempertahankan pengaruh di Afrika Utara dan Barat menjadi alasan yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini memberi pijakan diplomatik dan legal yang membuat kebijakan intervensi memperoleh legitimasi internasional, sekaligus memperkuat posisi Prancis di kawasan Sahel.

Dukungan PBB memberi kerangka hukum yang mengesahkan pengerahan pasukan sebagai bagian dari misi stabilisasi. Hal ini mengurangi potensi kritik bahwa operasi militer tersebut semata-mata digerakkan oleh kepentingan nasional. Dalam konteks hubungan bilateral, krisis di Mali membuka ruang bagi Prancis untuk mempererat kemitraan historisnya. Hubungan ini telah terjalin sejak kemerdekaan Mali pada 1960 dan diperkuat melalui berbagai kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Intervensi di masa krisis memperlihatkan bahwa Prancis masih menjadi mitra strategis yang siap membantu ketika diminta. Keputusan mempertahankan operasi militer juga didorong oleh perhitungan strategis jangka panjang. Kawasan Afrika Barat memiliki arti penting bukan hanya karena kedekatan geografisnya dengan Eropa, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang besar. Stabilitas Mali berarti terjaganya peluang investasi, keamanan jalur logistik, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi Prancis. Semua ini menunjukkan keterkaitan erat antara dimensi keamanan dan dimensi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Prancis. Kombinasi antara faktor domestik dan faktor eksternal menggambarkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan. Pemerintah Prancis harus merespons tekanan publik di dalam negeri, memastikan citra kepemimpinan yang tegas, dan melindungi kepentingan ekonomi strategis, sambil tetap mempertahankan posisi pentingnya di panggung internasional. Situasi ini sesuai dengan konsep *Two Level Game Theory*, di mana hasil di satu level akan memengaruhi legitimasi dan keberhasilan di level lainnya.

Meski intervensi ini memiliki tujuan yang jelas, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Serangan kelompok militan di Mali belum sepenuhnya berhenti, bahkan beberapa wilayah masih berada dalam ketidakstabilan. Sebagian pihak menilai bahwa operasi militer perlu diimbangi dengan upaya politik, pembangunan, dan rekonsiliasi yang menyentuh akar masalah, seperti marginalisasi etnis dan lemahnya institusi pemerintahan. Ada pula yang memandang keterlibatan Prancis sebagai bentuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan ekonomi di bawah narasi kemanusiaan. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa intervensi Prancis di Mali pada tahun 2020 lahir dari pertemuan berbagai kepentingan dan dorongan, baik dari dalam negeri maupun dari kancah internasional. Keberlanjutan intervensi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Prancis dan mitra-mitranya dalam memadukan pendekatan militer dengan strategi yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya menanggulangi ancaman keamanan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang kokoh dan berkelanjutan di Mali serta kawasan Sahel.

KESIMPULAN

Intervensi Prancis di Mali pada tahun 2020 merupakan hasil dari kombinasi faktor domestik dan internasional yang saling memengaruhi. Dari sisi domestik, terdapat tiga pendorong utama: penegasan kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron di panggung

internasional, tuntutan masyarakat Prancis untuk berperan dalam penyelesaian konflik di Mali demi keamanan nasional, serta kepentingan ekonomi strategis, khususnya terkait eksplorasi minyak dan uranium. Ketiga faktor ini memperkuat legitimasi politik dalam negeri dan mendukung keberlanjutan operasi militer.

Di sisi internasional, intervensi ini didorong oleh meningkatnya pengaruh Tiongkok di Afrika yang berpotensi menggeser posisi strategis Prancis, dukungan dan legitimasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan dasar hukum dan moral, serta permintaan resmi bantuan dari pemerintah Mali. Faktor-faktor eksternal ini tidak hanya memperkuat posisi diplomatik Prancis, tetapi juga menegaskan perannya sebagai aktor kunci di kawasan Sahel dan bekas wilayah koloninya.

Melalui kerangka *Two Level Game Theory*, terlihat bahwa keputusan intervensi Prancis di Mali lahir dari interaksi antara tekanan domestik dan dorongan internasional. Intervensi ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keamanan dan ekonomi Prancis, mempertahankan pengaruh geopolitik, sekaligus memenuhi tanggung jawab historis dan kemanusiaan terhadap Mali. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan karena ancaman kelompok militan belum sepenuhnya teratasi, sementara akar konflik seperti marginalisasi etnis dan lemahnya institusi negara belum ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, keberlanjutan intervensi memerlukan pendekatan yang menggabungkan aspek militer, diplomasi, pembangunan, dan rekonsiliasi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di Mali dan kawasan Sahel.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2012, May 27). Mali Utara akan menjadi negara Islam. *BBC News*.
- Chauzal, G., & van Damme, T. (2015). *The roots of Mali's conflict Moving beyond the 2012 crisis*.
- Fakhrudin, S. A. (2018). *Kebijakan Intervensi Militer Perancis Pada Konflik Mali Tahun 2013*. Universitas Brawijaya.
- Mardiani, D. (2023, April 16). PBB: Perhatikan Penyebab Konflik di Afrika. *Republika*.
<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/13/04/16/mlcssz-pbb-perhatikan-penyebab-konflik-di-afrika?>
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.
- Oktariyansah, M. I. (2025). Five Nos Approach Sebagai Bentuk Soft Hegemony Tiongkok di Kawasan Afrika. *Global and Policy Journal of International Relations*, 13(01).
<https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.4820>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427–460. <https://www.jstor.org/stable/2706785>
- Sianipar, I. M. J. (2019). INTERVENSI MILITER PERANCIS DALAM KONFLIK INTERNAL DI MALI TAHUN 2013. *Global Komunika*, 5(1).

